

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Badan Usaha Milik Negara ditunjuk menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung sebagai Pemungut PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah sesuai dengan aturan yang berlaku karena Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan peraturan perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions from the people to the State based on laws that can be forced and do not get reciprocity directly. Value Added Tax is a tax that is levied on the consumption of Taxable Goods and / or Taxable Services within the Customs Area. State-Owned Enterprises are appointed as Value Added Tax Collectors based on the Minister of Finance Regulation Number 85 / PMK.03 / 2012 which is then changed to the Minister of Finance Regulation Number 136 / PMK.03 / 2012. This study aims to find out and describe the application of legislation in the field of taxation in the collection, collection and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT TASPEN (Persero) Bandung Main Branch Office as a VAT Collector. The method used in this research is a qualitative approach. The results showed that the Implementation of Collection, Depositing and Reporting Value Added Tax at PT TASPEN (Persero) Bandung Main Branch Office was in accordance with applicable regulations because the Implementation of Collection, Depositing and Reporting Value Added Tax (VAT) in accordance with tax regulations regarding the Added Tax The current value (VAT) in Indonesia.

Keywords: Taxes, Value Added Tax, Value Added Tax Collection